

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan salah satu Dinas Teknis yang menangani pekerjaan fisik yang layanannya mencakup Pemeliharaan dan Pembangunan: Jalan, Jembatan, Sarana dan Prasarana Air Bersih, Drainase, Gedung, Irigasi, Sungai, Pantai, Air Baku serta Lampu Penerangan Jalan Umum. Selain itu juga menangani kegiatan yang bersifat non fisik yakni retribusi alat berat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah, menjalankan fungsi sebagai berikut:

- penyusunan rencana dan program di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya dan penataan ruang, dan pertanahan;
- perumusan kebijakan di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya dan penataan ruang, dan pertanahan;
- pelaksanaan koordinasi di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya dan penataan ruang, dan pertanahan;
- pelaksanaan kebijakan di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya dan penataan ruang, dan pertanahan;
- pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya dan penataan ruang, dan pertanahan;
- pelaksanaan administrasi dinas bina marga, sumber daya air, cipta karya dan penataan ruang, dan pertanahan;
- pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

1.2. Landasan Hukum

Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2017 berlandaskan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Pemerintah Momor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/lembaga;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031;

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Perubahan Rencana Kerja disusun dengan maksud untuk menyusun rencana program/kegiatan yang menjadi prioritas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2017 dengan mempertimbangkan tingkat kesesuaian program/kegiatan, payung hukum dan kemampuan anggaran.

b. Tujuan

- 1) mensinkronkan prioritas kegiatan pembangunan dari berbagai kegiatan.
- 2) menetapkan prioritas kegiatan yang akan dimuat dalam renja Perangkat Daerah
- 3) menyesuaikan prioritas Renja Perangkat Daerah dengan Plafon/Pagu dana Perangkat Daerah yang termuat dalam prioritas pembangunan daerah;
- 4) mengidentifikasi keefektifan berbagai regulasi yang berkaitan dengan fungsi Perangkat Daerah, terutama untuk mendukung terlaksananya Rencana Kerja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2017 berpedoman pada permendagri Nomor 54 Tahun 2010 yaitu:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 2017

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai dengan Triwulan II 2017 dan Capaian Renstra SKPD

Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2017 tercermin dalam pencapaian kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui beberapa program.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Penyediaan Jasa Surat menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik
- c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional
- d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- f. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- g. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- h. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan
- i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
- j. Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan
- k. Penyediaan Makanan dan Minuman
- l. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- m. Penunjang Administrasi Perkantoran
- n. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

- a. Pembangunan Gedung Kantor
Pada tahun 2017 akan dibangun gedung kantor antara lain:
 1. Gedung Kantor Kecamatan Sruweng.
 2. Gedung Sanggar Pramuka Kebumen.
 3. Gedung Pendopo dan Rumah Dinas Bupati Kab. Kebumen.
- b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 1. Kegiatan perlengkapan gdung kantor dipergunakan untuk
 - GPS
 - Kalkulator
 - Filling kabinet
 - Gorden dan ril
 - Lap Top
 - Printer
 - UPS
 - Kamera Digital dan
 - Speker
- c. Pengadaan Tanah

Pembebasan tanah meliputi JJLS, Kawasan Industri, Jembatan Bonjok, Jembatan Caruban, Lingkar Utara (9 ruas jalan), Koramil Prembun, Air Bersih Desa Merden, Jalan Jembatan Ngabean-Pekutan, Jalan Mirit-Petikusan Pantai, Kecamatan Karangsembung, Embung Giritirto, Kecamatan Adimulyo, Drainase Desa Adikarso, kawasan hutan perhutani.

d. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan Gedung kantor dilingkungan Pemkab Kebumen antara lain Gedung Satpol PP dan Dinas Kelautan dan Perikanan, Gedung F Kompleks Setda, Kecamatan Alian, gedung kantor Kec. Ayah, gedung kantor UPT DPUPR Kutowinangun, gedung kantor UPT DPUPR Prembun, Pemeliharaan Gedung Ratih TV, gedung kantor DPUPR Kebumen.

e. Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeleur

Telah terlaksananya pemeliharaan mebeleur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang beserta sembilan UPT Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kebumen.

3. Program peningkatan disiplin aparatur.

a. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

Di anggaran perubahan kegiatan ini dikurangi karena Bidang Kebersihan dan Pertamanan sudah tidak ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capain kinerja dan keuangan.

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

5. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan

a. Peningkatan Jalan (BANPROV)

Pada Tahun 2017 akan dilaksanakan kegiatan pada ruas Jalan Gombong-Kuwarasan Kab. Kebumen (Banprov 2015), Jalan Demangsari-Bulurejo Kab. Kebumen (Banprov 2015), Jalan Krakal-Pujotirto Kec. Alian (Banprov 2015), Jalan Pringtutul-Jatijajar Kab. kebumen (lanjutan) (Banprov 2015), Ruas Jalan Lingkar Selatan Karangsembung - Sadang Nomor Ruas 207, Ruas Jalan Sadangkulon - Srisip Nomor Ruas 190, Paket SPV BM 38 Peningkatan Jalan Kemanguan-Tanuharjo Kab. Kebumen (tindak lanjut temuan BPK).

"

b. Peningkatan Jalan

Pada Tahun 2017 akan dilaksanakan kegiatan pada ruas Jalan Kenteng - Ketileng, Jalan Wadasmalang - Slepi, Jalan Pujotirto - Manisan, Jalan Krakal - Pujotirto, Jalan Karangsambung - Sadangwetan, Jalan Pagebangan - Somagede, Jalan Kambalan-Ambal, Jalan Petanahan - Puring, Jalan Puring - Kebondalem, Jalan Peniron-Kebakalan, Ruas Jalan Kabekelan-Lembupurwo, Ruas Jalan Bagung-Sembir, Ruas Jalan Jatisari-Kejayan, Ruas Jalan Kemujan Sidobunder, Jalan Gentan-Mirit Petikusan, Jalan Buayan-Jladri, Ruas jalan Meles-Banjareja, Jalan Purwodeso Petanahan, Jalan Tamanwinangun Bocor.

c. Peningkatan Jembatan

Pada Tahun 2017 akan dilaksanakan kegiatan pada Jembatan Muntuk Dawung pada ruas jalan Rowokele-Banyumudal, Jembatan Pengempon dan Jembatan Losari pada ruas jalan Pagebangan-Somagede, Jembatan Pada Ruas Jalan Bonosari-Kedungwringin, Jembatan Korowelang pada ruas jalan Gumenter-Kabuaran, Jembatan Cacaban pada Ruas Jalan Kebakalan-Giritirto.

6. Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan

a. Perencanaan Pembangunan Jalan

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Teknis Perencanaan Pembangunan Jalan Bidang Bina Marga

b. Perencanaan Pembangunan Jembatan

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Teknis Perencanaan Pembangunan Jembatan Bidang Bina Marga

c. Pembangunan Jembatan

Terbangunnya Jembatan Caruban, Jembatan Ngabean-Pekutan, Jembatan Karanggayam, Jembatan Kepek Bonosari, Jembatan Bonjok (Lanjutan)

d. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Terlaksananya pekerjaan monitoring evaluasi pekerjaan fisik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen

7. Program Pengembangan Data/Informasi

a. Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

8. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong.

- a. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
Terlaksananya pembangunan Drainase/Gorong-gorong di Kab. Kebumen antara lain Drainase jalan raya soka pejagoan kebumen, lingkungan poncowarno, Kebumen, lingkungan Kecamatan Ayah, lingkungan Kecamatan Kuwarasan, lingkungan Kecamatan Karanganyar, lingkungan Kecamatan Gombong, lingkungan Kecamatan Prembun, Desa Sidomoro Rw.06 Kecamatan Buluspesantren, Jalan Cenderawasih Kebumen, Desa Nampudadi Kecamatan Petanahan, Dk. Gunungmujil Kelurahan Bumirejo Kec. Kebumen, Desa Logede Kecamatan Pejagoan, Lingkungan Pasar Kutowinangun, Jl. Ronggowarsito, Drainase Jl. Kejayan Kebumen, Jl. Mangga Kebumen, Jl. Kembaran-Kedungbener, Lingkungan Kec Buayan.

9. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

- a. Lampu Penerangan Jalan Umum Kabupaten Kebumen
Digunakan untuk membayar rekening listrik LPJU di Kabupaten Kebumen
- b. Pengembangan/Perluasan Jaringan Listrik Pedesaan (BANPROP)
Digunakan untuk pasang baru LPJU menuju tempat wisata di Kabupaten Kebumen, meterisasi dan lampu asmaul husna.

10. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. Peningkatan Manajemen aset/barang daerah

11. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

- a. Fasilitasi Kemudahan Perijinan Pengembangan Usaha

12. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

- a. Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknik rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Bidang Bina Marga
- b. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
Pada Tahun 2017 akan dilaksanakan kegiatan pada Jalan Demangsari - Ayah, Jalan Karanganyar - Karanggayam, Jalan Soka - Klirong, Jalan Poncowarno-Karangtengah, Jalan Sinungrejo - Pekutan, Talud Karangkemiri pada ruas jalan Krakal Kaligending, Bronjong Mertokondo-Karangsambung, Benerkulon-blengorwetan, Talud+beton pesalakan, kaliputih-jatipurus, jl. Bagung-sembir, Jl.Krakal-Kaligending, Talud Sedayu lawangawu, Aspal Grogol-jogosimo, Wilayah UPT di

Kabupaten Kebumen, jalan kelurahan jatiluhur, jalan jingklak-karanganyar, depan SMP N 2 Adimulyo ruas jalan adikarto-kemujan, jalan poros desa (Nampudadi/UPTD Pertanian-Grujugan-Tanjungsari/Pasar Gamblok), jalan kenanga Pejagoan Desa Pejagoan Kec. Pejagoan, Drainase Jalan Kenanga dan Jalan Pejuang Kec. Pejagoan, Jalan Poros Desa Peniron-Watulawang, Jalan Kedawung-Kedungwinangun, Jembatan Penghubung Desa Pekutan Kec. Mirit, Jalan Kemanguan-Tanuharjo, jalan Kadipaten-Ambal, Jalan Selokerto-Buayan, Jalan Wonosari-Sruni, Jalan Sitibentar-Wergonayan, Jalan Lerep-Karangtengah, Jalan Karanganyar-Adimulyo, Jalan Sapta Marga Gombong, Jalan Kejayan-Pantai, Jalan Merbabu Gombong, Jalan Dalam Kota Gombong, Jalan Wilis Kebumen, Jalan Dalam Kota Kebumen, Jalan Kuwarasan-Puring, Jalan Sruni-Krakal, Jalan Weton Weton-Rangkah, Jalan Adikarto-Kemujan, Jalan Rendeng-Jogomertan.

c. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan

Pada Tahun 2017 akan dilaksanakan kegiatan pada Jembatan Kabuaran Kec. Prembun.

d. Rehabilitasi/Pemeliharaan (DAK)

Pada Tahun 2017 akan dilaksanakan kegiatan pada Tlogodepok - Tlogopragoto, Tersobo - Bonorowo, Sinungrejo - Pekutan, Sendangdalem - Bendungan, Sawangan - Padureso, Kutowinangun - Poncowarno, Banjaran - Kaliputih, Mrinen - Peneket, Kaliputih - Jatipurus, Mertokondo - Karangsambung, Karangsambung - Sadangwetan, Krakal - Sadangkulon, Peniron - kebakalan, Dalam kota (kusuma, sutoyo, arumbinang, suprpto), Wonotirto - Gunungsari, Pagebangan - Somagede, Demangsari - Ayah, Gombong - Lawangawu.

e. Pengadaan Semen untuk pembangunan sarana prasarana pedesaan/perkotaan

Terlaksananya pengadaan semen untuk bantuan ke Tingkat Desa/Kelurahan di Kabupaten Kebumen.

13. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong

a. Rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong

Pada Tahun 2017 akan dilaksanakan kegiatan pada Desa Meles Kec. Adimulyo.

14. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

a. koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

15. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan.

a. Pengadaan Alat-alat berat

Pengadaan Alat-alat berat meliputi:

- Pengadaan Excavator 3 unit
- Pengadaan Buldozer 1 unit

b. Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat

Pada tahun 2016 Kepemilikan alat berat yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebanyak 57 (lima puluh tujuh) unit. Pemeliharaan alat berat ditargetkan sebesar Rp. 385.000.000,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 354.727.468,00 kinerja ini mencapai 92,14 % (Sembilan puluh dua koma empat belas persen) yang terdiri dari :

- Rekondisi baby Roller MGD-1000 Eks Barata
- Penggantian suku cadang alat berat Engine Fill 511 Eks Rek.
- Penggantian suku cadang Excavator dll.

Hal ini sangat membantu pencapaian pendapatan daerah pada bidang pemanfaatan aset daerah dari retribusi alat berat

16. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

a. Perencanaan pembangunan jaringan irigasi

Tersusunnya dokumen DED Jaringan irigasi dan Embung.

b. Perencanaan normalisasi saluran sungai

Tersusunnya dokumen perencanaan teknis sungai.

c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan bidang SDA selama 1 tahun.

d. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Pemeliharaan D.I. Slirap Ds. Wonoharjo Kec. Rowokele, D.I. Banioro Ds. Banioro Kec. Karangsambung, D.I. Bango Ds. Bumiagung kec. Rowokele, D.I. Kedungkeji Ds. Kretek Kec. Rowokele, D.I. Semampir Ds. Jatiroto Kec. Buayan, D.I. Kebon agung Ds. Jatinegaran Kec. Sempor, D.I. Pringtutul Ds. Pringtutul Kec. Rowokele, D.I. Sawangan Ds. Wonoharjo kec. Rowokele.

e. Operasi dan pemeliharaan Sungai

Pada Tahun 2017 akan dilaksanakan kegiatan pada Desa Karangtanjung Kecamatan Alian, Desa Karangkembang Kecamatan Alian, Desa Sadangwetan Kecamatan Sadang, Desa Adikarto Kecamatan Adimulyo, Desa Sendangdalem Kecamatan Padureso, Desa Kaliputih Kecamatan Kutowinangun.

f. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK)

Pada Tahun 2017 akan dilaksanakan kegiatan pada DI Banioro, DI Kali Kayan Kanan, DI Kaligombong II, DI Rembang, DI Pohkumbang II, DI Pohkumbang IV, DI Sidobunder, DI Wadasmalang II, DI Somagede III, DI Tilampok, DI Wonokromo II, DI Gentan, DI Kalikemit, DI Kalipoh, DI Tratas, DI Jambreng, DI Pengempon, DI Kali Kudu, DI Wagirpandan II, DI Sempor, DI Glontor, DI Kali Trenggulun, DI Kedungwringin II, DI Kaligedang, DI bangkong I, DI Bendung Karet, DI Caruban, DI Blangkunang.

17. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

a. Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya

Pada Tahun 2017 akan dilaksanakan kegiatan pada Embung Desa Banjarharjo, Desa Kalisana, Desa Sadangkulon, Kalirejo, Sadangwetan, Seling.

18. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

a. Penyediaan prasarana dan sarana air limbah

Pada Tahun 2017 akan dilaksanakan kegiatan Penyediaan ipal komunal skala lingkungan di Desa Murtirejo Kecamatan Kebumen, Desa Candiwulan Kec. Kebumen, Desa Candumulyo Kec. Kebumen, Desa Kewedusan Kec. Kebumen, Desa Muktisari Kec. Kebumen, Desa Sedayu Kec. Gombong, Desa Kedungpuji Kec. Gombong, Desa Panjer Kec. Kebumen, Desa Tamanwinangun Kec. Kebumen, Desa Kebumen Kec. Kebumen, Desa Selang Kec. Kebumen, Desa Gemeksekti Kec. Kebumen, Desa Bumirejo Kec. Kebumen, Desa Semanding Kec. Sempor. Dan juga Pengadaan truck tangki tinja 1 unit.

b. Pengembangan sistem distribusi air minum

Tersedianya Sistem Distribusi Air Minum untuk Daerah Rawan Air Bersih di Desa Penusupan Kec. Sruweng, Desa Karangbolong Kec. Buayan, Desa Kedungwaru Kec. Karangsambung, Desa Karangjambun Kec. Sruweng, Desa Widoro Kec. Karangsambung, Desa Karangsari Kec. Buayan, Desa Tanggeran Kec. Sruweng, Desa Pohkumbang Kec. Karanganyar, Desa

Aditirto Kec. Pejagoan, Desa Bojongsari Kec. Alian, Desa Sidoagung Kec. Sruweng, Desa Giripurno Kec. Karanganyar, Desa Jatijajar Kec. Ayah, Desa Wonosari Kec. Sadang, Desa Semali Kec. Sempor, Desa Wadasmalang Kec. Karangsambung, Desa Redisari Kec. Buayan, Air Bersih Desa Nogoraji Kec. Buayan, Desa Watukelir Kec. Ayah, Desa Jemur Kec. Pejagoan, Desa Jatiluhur Kec. Rowokele, Desa Sampang Kec. Sempor, Desa Tlogosari Kec. Ayah, Desa Jogomulyo Kec. Buayan, Desa Sidogede Kec. Prembun.

19. Program Pengendalian Banjir

- a. Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai
Terwujudnya kondisi sungai dalam keadaan baik di Desa Tunjungseto Kecamatan Sempor, Desa Sidayu Kecamatan Gombong, Desa Jatinegara dan Desa Kalibegi Kecamatan Sempor, Desa Grenggeng Kecamatan Karanganyar, Desa Semanding Kecamatan Gombong, Desa Kaligubuk Kecamatan Padureso, Desa Sumberadi dan Desa Bandung Kecamatan Kebumen, Desa Tanggeran Kecamatan Sruweng, Desa Purwodadi Kecamatan Kuwarasan, Desa Bonjok Kecamatan Adimulyo, Desa Jatipurus Kecamatan Poncowarno, Desa Penusupan Kecamatan Sruweng, Desa Sitiadi - Desa Kaleng Kecamatan Puring.
- b. Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai
Meningkatnya pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan sungai; Meningkatnya pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan sungai di Desa Wagirpandan Kecamatan Rowokele, Desa Kalisana Kecamatan Karangsambung, Desa Kalirejo Kecamatan Karanggayam.
- c. Normalisasi/Pembangunan Jaringan Drainase
Tercapainya fungsi jaringan drainase di Desa Banjarsari Kecamatan Ambal, Desa Grenggeng Kec. Karanganyar dan Desa Meles Kec. Adimulyo, Desa Karangsari Kecamatan Buayan, Desa Kawedusan Kecamatan Kebumen, Desa Demangsari Kecamatan Ayah, Desa Sidobunder Kecamatan Puring, Desa Kemujan Kecamatan Adimulyo
- d. Operasi dan Pemeliharaan Pantai dan Muara
Terlaksananya operasi dan pemeliharaan pantai dan muara di Desa Patukrejomulyo Kecamatan Mirit, Desa Sidomukti Kecamatan Kuwarasan, Desa Sрати Kecamatan Ayah, Desa Adiwarno Kecamatan Buayan, Desa Sidodadi Kecamatan Puring, Desa Sidobunder Kecamatan Puring.

- e. Rehabilitasi / Pembangunan Pantai dan Muara
Terwujudnya kondisi muara sungai dan pantai dalam kondisi baik di Desa Pasir Kecamatan Ayah, Desa Argopeni Kecamatan Ayah.
- f. Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai (BANPROP)
Terlaksananya Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai (Banprov) Kali Srengseng Kec. Sempor, Kali Lowereng Kec. Gombong, Kali Kedungbener Kec. Alian, Kali Bedegolan Kec. Kutowinangun (2 lokasi), Kali Gombong Kec. Kuwarasan.

20. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh

- a. Perencanaan pengembangan infrastruktur
Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknik bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang.

21. Program pembangunan infrastruktur Perdesaan

- a. Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan
Terlaksananya kegiatan sarana dan prasarana air bersih pedesaan yang memadai di Desa Sadangwetan Kec. Sadang, Desa Sadangkulon Kec. Sadang, Desa Kedungwringin Kec. Sempor, Desa Seboro Kec. Sadang, Desa Bonosari Kec. Sempor, Desa Logandu Kec. Karanggayam, Desa Krakal Kec. Alian, Desa Jintung Kec. Ayah, Desa Giyanti Kec. Rowokele, Desa Pakuran Kec. Sruweng.
- b. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan
Tersedianya penunjang Pansimas AMPL dan sanimas guna pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan; Tersedianya penunjang Pansimas AMPL dan sanimas guna pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan di Desa Wonoharja Kec. Rowokele, Desa Wagirpandang Kec. Rowokele, Desa Argosari Kec. Ayah, di Desa Rogodadi Kec. Buayan, Desa Tugu Kec. Rowokele.
- c. Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan (Kuota Kecamatan)
Pada Anggaran Perubahan Kegiatan ini dialihkan ke Belanja Tidak Langsung karena jalan desa sudah tidak menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen
- d. Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan (Kuota Kecamatan)

Tercukupinya air bersih di Desa Peniron Kec. Pejagoan, Desa Karangtengah Kec. Poncowarno, Desa Kalijering Kec. Padureso, Desa Kretek Kec. Rowokele, Desa Tunjungseto Kec. Sempor, Desa Jatiroto Kec. Buayan, Desa Kalijaya Kec. Ayah, Desa Sempor Kec. Sempor, Desa Argopeni Kec. Ayah, Desa Kaligending Kecamatan Karangsambung

- e. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan (Kuota Kecamatan)
Tercukupinya air bersih di pedesaan Desa Banyumudal.

22. Program Perencanaan Tata Ruang

- a. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

23. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

- a. Pengawasan pemanfaatan ruang.

Terlaksananya pengawasan pemanfaatan ruang di Kabupaten Kebumen. Pada kegiatan ini, bahwa retribusi IMB pada tahun 2017 ditargetkan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 dan realisasi pendapatan dari retribusi IMB sampai dengan Triwulan I sebesar Rp. 504.326.050,00 kinerja ini mencapai 25,22 % (dua puluh lima koma dua puluh dua persen). Guna mendukung tercapainya besaran pendapatan yang bersumber dari retribusi IMB, maka diharapkan agar bangunan yang belum ada IMB nya, agar dilakukan pembayaran IMB sehingga dapat mendukung pencapaian besaran retribusi IMB

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja OPD berdasarkan sasaran/target Renstra OPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan OPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen meliputi:

2.2.1. Jalan

Secara geografis Kabupaten Kebumen memiliki lokasi yang sangat strategis karena berada di jalur selatan Provinsi Jawa Tengah. Jalur selatan tersebut menghubungkan antara Bandung-Yogyakarta yang melewati Kabupaten Kebumen. Posisi yang sangat strategis tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Kabupaten Kebumen, oleh karena itu dukungan sarana dan prasarana jalan yang berkualitas serta sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan transportasi perlu mendapatkan perhatian serius.

Jalur selatan yang melewati wilayah Kabupaten Kebumen merupakan jalan nasional dan provinsi dengan panjang jalan nasional 54,19 km dan jalan provinsi sepanjang 30,09 km sedangkan panjang jalan kabupaten yang menghubungkan pusat ibukota Kabupaten Kebumen dengan seluruh wilayah kecamatan sepanjang 975,15 km. Dari 975,15 km panjang jalan kabupaten, sebanyak 448,64 km (46,01%) dengan kondisi baik, 199,61 km (20,470%) kondisi sedang, 150,21 km (15,40%) kondisi rusak ringan dan 176,69 km (18,12%) kondisi rusak berat dengan permukaan jalan berupa aspal, dan sebagian berupa batu kerikil. Gambaran secara rinci perkembangan jalan kabupaten berdasarkan kondisi jalan dapat disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel
Panjang Jalan Kabupaten Berdasarkan Kondisi Jalan
Kabupaten Kebumen
Tahun 2010-2015

No	Kondisi Jalan	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
a	Baik	Km	418,59	454,68	473,03	495,69	448,64
b	Sedang	Km	96,11	91,94	132,92	138,50	199,61
c	Rusak ringan	Km	83,47	58,64	182,63	157,69	150,21
d	Rusak Berat	Km	17,02	9,92	169,50	166,20	176,69
	Jumlah	Km	615,20	615,20	958,08	958,08	975,15

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2015 terdapat penambahan ruas jalan kabupaten sepanjang 17,07 km sehingga total panjang jalan kabupaten mencapai 975,15 km . Selama tahun 2015 telah dibangun jalan poros desa yang berubah status menjadi jalan kabupaten sepanjang 17,07 km, antara lain Ruas Jalan Kemayatan–Prebun sepanjang 2,10 km, Ruas Ayah-Argosari sepanjang 3,00 km, Ruas Sitibentar-Wergonayan sepanjang 4,00 km.

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam memelihara dan meningkatkan kualitaas kondisi jalan belum terwujud secara optimal. Apabila kondisi tersebut tidak segera ditangani dengan baik akan menimbulkan dampak negatif yaitu meningkatnya angka kecelakaan pengguna jalan serta berpengaruh terhadap kegiatan perekonomian di Kabupaten Kebumen. Hal ini mengingat sarana dan prasarana jalan yang baik dapat menunjang

pertumbuhan pembangunan ekonomi di Kabupaten Kebumen serta dapat membuka akses dalam kegiatan sekor perdagangan maupun transportasi.

Pada ruas-ruas jalan arteri khususnya di Kota Kebumen yang berfungsi menghubungkan kota atau jalur regional namun saat ini juga berfungsi sebagai jalur internal kota. Himpitan fungsi yang demikian sedikit banyak menyebabkan jalan-jalan tersebut dipadati oleh pergerakan regional maupun lokal, pada akhirnya kecepatan menjadi rendah. Sedangkan untuk menghubungkan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Barat dan Yogyakarta merupakan jalan Nasional dengan kondisi baik.

Jalan Nasional yang melewati wilayah Kabupaten Kebumen sepanjang 60,72 km, terdiri atas Ruas Jalan Batas Banyumas-Kebumen 30,35 km, Jalan Lingkar Selatan Kebumen 9,11 km dan Batas Kota Kebumen-Prembun (Jembatan Gebang) 12,75 km, Jalan ke Purworejo 4,22 km dan Ruas Jalan Prembun-Kutoarjo (Jembatan Gebang) 4,89 km. Sedangkan Jalan Provinsi terdiri atas Ruas Jalan Prembun-Wadaslintang 16,56 km dan Ruas Jalan Gombong Sempor Ketileng sepanjang 13,53 km. Total panjang Jalan Provinsi yang melewati wilayah Kabupaten Kebumen 30,09 km.

Untuk jalan non status, dengan total panjang 60,00 km terdiri atas Ruas Jalan Wawar-Buluspesantren 18,60 km, Ruas Jalan Buluspesantren-Karangbolong 24,40 km dan Ruas Jalan Karangbolong-Bodo sepanjang 17,00 km.

Gambaran tentang kondisi dan panjang jalan nasional, provinsi dan kabupaten disajikan pada tabel berikut :

Tabel
Panjang Jalan Berdasarkan Kewenangan
Tahun 2010-2015

No	Kewenangan	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Nasional	Km	54,19	54,19	54,19	54,19	54,19	54,19
2	Propinsi	Km	30,09	30,09	30,09	30,09	30,09	30,09
3	Kabupaten	Km	615,20	615,20	615,20	958,08	958,08	975,15
4	Jalan desa	Km	Na	Na	1.592,08	1.254,01	1.254,01	1.254,01
5	Nonstatus	Km	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

2.2.2. Jembatan

Jembatan merupakan sarana dan prasarana penting dalam menghubungkan satu kawasan dengan kawasan lain. Sebagai sarana penghubung, jembatan merupakan infrastruktur vital masyarakat dalam kerangka kesatuan dan persatuan bangsa. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen selama 2015 telah membangun dan memelihara jembatan sebanyak 6 unit antara lain Jembatan Purbowangi, Jembatan Seboro, Jembatan Kemukus, Jembatan Sidoagung, Jembatan Roworejo dan Jembatan Pesuningan yang menghubungkan antar kawasan. Jumlah seluruh jembatan yang sudah dibangun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen sampai Desember 2015 sebanyak 355 unit meliputi jembatan besar dan kecil.

Namun demikian masih terdapat wilayah yang membutuhkan bangunan jembatan sebagai sarana transportasi terutama wilayah utara Kabupaten Kebumen agar mobilisasi masyarakat lebih mudah dalam menjangkau sumber sumber ekonomi. Kondisi yang ada, wilayah utara Kebumen belum sepenuhnya bisa dihubungkan dari timur ke barat yang antara lain disebabkan masih terbatasnya bangunan jembatan sehingga masyarakat masih menempuh jalur panjang memutar untuk mobilisasi.

Ke depan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merencanakan akan membangun jembatan penghubung antar wilayah yang antara lain Jembatan Kaligending membelah Sungai Lokulo menghubungkan Kecamatan Karangsambung dan Karanggayam, Jembatan Sarwogadung membelah Sungai Gentan, Jembatan Pekutan yang membelah Sungai Keceme dan Jembatan Sangubanyu Buluspesantren.

2.2.3. Drainase

Panjang drainase sekunder di Kabupaten Kebumen untuk jenis drainase sekunder tertutup maupun drainase sekunder terbuka tidak menunjukkan peningkatan, mengingat terbatasnya alokasi anggaran untuk pembangunan drainase. Selama tahun 2015, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen telah membangun dan memelihara drainase di sepanjang ruas jalan kabupaten, antara lain drainase kota Kutowinangun,

drainase Petanahan, drainase lingkungan pasar Ambal dan lain lain drainase lingkungan permukiman.

Tabel
Kondisi drainase per wilayah
di Kabupaten Kebumen Tahun 2015

No	Uraian	Panjang (km)	Pasangan batu (km)	Pasangan beton (km)	Saluran Tanah (km)	Ket
1	Wilayah Kebumen	171,93	46,96	21,44	103,53	
	Baik		20,61	7,09	2,65	
	Sedang		24,00	8,10	46,08	
	Rusak		2,35	6,25	54,80	
2	Wilayah Gombong	105,47	40,46	0,85	64,16	
	Baik		12,79	0,00	1,30	
	Sedang		26,28	0,45	48,58	
	Rusak		1,39	0,40	14,28	
3	Wilayah Kutowinangun Prembun	38,54	2,37	10,82	25,35	
	Baik		1,77	4,85	0,00	
	Sedang		0,00	0,00	0,00	
	Rusak		0,60	5,97	25,35	
4	Wilayah Karanganyar	96,35	12,29	14,44	69,62	
	Baik		2,87	1,68	0,34	
	Sedang		6,70	8,72	40,86	
	Rusak		2,72	4,04	28,42	
	Jumlah	412,29	102,08	47,55	262,66	

2.2.4. Air Bersih dan Air Limbah

Persentase Proporsi rumah tangga dengan akses sarana air minum di perkotaan maupun perdesaan meningkat dari tahun ke tahun. Sistem air minum aman untuk masyarakat berupa air minum perpipaan untuk 26 kecamatan telah mencapai 197.359 jiwa penerima manfaat. Kegiatan air minum dikelola melalui program APBN, Pamsimas, AMPL, DAK, HID maupun Banprov dan APBD.

Jumlah masyarakat penerima manfaat air bersih (per jiwa) dari tahun ke tahun terus memperlihatkan peningkatan cukup signifikan. Sampai tahun 2010 jumlah masyarakat penerima manfaat air bersih sebanyak 170.689 jiwa. Jumlah ini terus meningkat seiring dengan penambahan program pembangunan dan pemeliharaan instalasi air bersih menjadi 420.325 jiwa pada tahun 2015. Namun demikian, dengan banyaknya desa di Kabupaten Kebumen yang termasuk desa rawan air bersih, sehingga masih diperlukan tambahan anggaran untuk pembangunan dan

pemeliharaan air bersih. Sumber pembiayaan air bersih masih bergantung sumber pembiayaan pusat (DAK), kontribusi APBD masih sangat terbatas. Harapannya ke depan, alokasi pendanaan untuk air bersih bisa ditingkatkan, agar target pencapaian air bersih 100% pada tahun 2019 bisa tercapai.

Berikut kami tampilkan data penerima manfaat air bersih Kabupaten Kebumen periode 2010-2015, sebagai berikut;

Tabel
Penerima Manfaat Sarana Air Bersih (jiwa)
Kabupaten Kebumen
Sampai Tahun 2015

No	Sumber pendanaan	Sampai 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Jumlah (jiwa)
1	APBN	12.869	0	0	0	0	0	12.869
2	APBD	0	0	0	0	21.317	0	21.317
3	Pamsimas	44.867	25.911	32.884	21.947	15.317	13.484	154.410
4	DAK	69.468	13.541	6.160	15.473	12.149	12.499	129.290
5	AMPL	43.485	600	0	0	0	0	44.085
6	Banprov	0	0	0	0	5.882	0	5.882
7	HID	0	841	9.034	18.508	9.810	6.235	44.428
8	HKP	0	0	0	0	4.826	1.100	5.926
9	Kuota Kecamatan	0	0	0	0	2.118	0	2.118
	Jumlah	170.689	40.893	48.078	55.928	71.359	33.318	420.325

Sementara itu sistem air limbah di Kabupaten Kebumen hingga saat ini masih ditangani secara individu oleh tiap-tiap rumah tangga dan masing-masing industri (Industri rumah tangga). Air limbah rumah tangga langsung dibuang ke saluran pembuangan/selokan. Untuk industri, sebagian kecil memiliki IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah), air sebelum dibuang ke perairan umum diolah di dalam unit ini terlebih dahulu.

Sarana air limbah rumah tangga baik berupa IPAL maupun IPLT secara kualitas maupun kuantitas masih terbatas. Kondisi ini banyak disebabkan kesulitan mencari lokasi IPAL untuk kawasan. Salah satu IPAL kawasan yang sudah terbangun adalah IPAL kawasan Kutosari sementara untuk IPLT selama periode tahun 2010-2015 sebanyak 1 unit, yaitu IPLT Kaligending. Namun sampai sekarang belum dioperasikan.

2.2.5. Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)

Lampu Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Kebumen dari tahun ke tahun terus ditingkatkan, hal ini sejalan dengan semakin tingginya kebutuhan penerangan jalan umum seiring dengan semakin padatnya arus kendaraan bermotor dan pengguna jalan lainnya. Pemasangan baru maupun pemeliharaan dan pemindahan titik LPJU diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun demikian anggaran LPJU lebih banyak bersumber dari APBN maupun Banprov, sementara sumber pembiayaan APBD masih sangat terbatas. Sebaran titik LPJU di kabupaten Kebumen dapat terlihat dari tabel berikut;

Tabel
Sebaran LPJU Di Kabupaten Kebumen
Tahun 2010-2015

No	Kecamatan	s/d 2010	Titik LPJU Kab Kebumen					Jumlah sampai 2015
			2011	2012	2013	2014	2015	
1	Adimulya	77		1	8	6	14	106
2	Alian	70		4	9	43	12	138
3	Ambal	105			3	1	5	114
4	Ayah	57			3	2	42	104
5	Bonorowo	36			6	6	6	54
6	Buayan	70		1	1	3	15	90
7	Buluspesantren	76		4	10	60	8	158
8	Gombong	52		1	5	4	141	203
9	Karanganyar	55	8	6	2	2	37	110
10	Karanggayam	57		5	4	3	8	77
11	Karangsambung	44		1	2	9	6	62
12	Kebumen	401	36	3	19	24	163	646
13	Klirong	86		3	6	4	10	109
14	Kutowinangun	70		3	2	7		82
15	Kuwarasan	72			3	4	11	90
16	Mirit	66		3	11	7	10	97
17	Padureso	32		1		26	10	68
18	Pejagoan	50	10	4	1	71	22	158
19	Petanahan	72		2	10	9	37	130
20	Poncowarno	35		2			6	43
21	Prembun	48	30	1	9	5	3	96
22	Puring	71		7	10	62	22	172
23	Rowokele	48	30		1	2	13	94
24	Sadang	21		2	3		6	32
25	Sempor	59				4	15	78
26	Sruweng	69		2	11	4	38	124
	Jumlah	1.899	114	55	139	368	660	3.235

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

1. Penampilan fisik gedung perkantoran memang sudah terlihat bagus dan megah namun demikian masih terdapat beberapa gedung perkantoran dan bangunan pendukung lainnya yang nampak kusam dan kurang terawat, hal ini disebabkan oleh usia bangunan yang sudah tua.
2. Masih banyak ditemukan infrastruktur jalan rusak dan berlobang, yang disebabkan oleh kelebihan muatan (tonase) pengguna jalan yang tidak sesuai dengan kelas jalan maupun akibat bencana alam.
3. Masih banyak ditemukan masyarakat yang kesulitan dalam mobilisasi arus barang dan jasa antar wilayah dengan jarak tempuh cukup jauh, hal ini disebabkan karena masih terbatasnya bangunan jembatan penghubung antar wilayah.
4. Masih ditemukannya masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih, hal ini disebabkan oleh banyaknya instalasi pengolahan air bersih yang tidak berfungsi dengan baik, rusak maupun akibat kekeringan sumber mata air.
5. Masih rendahnya tingkat pencapaian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan dan kurangnya sosialisasi mengenai Perda IMB.
6. Belum optimalnya penataan ruang di wilayah Kabupaten Kebumen, hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dan kurangnya sosialisasi mengenai tata ruang di wilayah Kabupaten Kebumen.
7. Masih banyak jalan lingkungan permukiman yang rusak di wilayah perkotaan dan perdesaan. Hal ini disebabkan belum teralokasinya anggaran yang cukup di seksi prasarana dan sarana permukiman Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang.
8. Masih ditemukan genangan air di permukiman akibat dari kurangnya bangunan drainase. Kondisi ini disebabkan kurangnya anggaran untuk membangun drainase.
9. Masih belum tertanganinya air limbah di permukiman baik di perkotaan maupun perdesaan karena belum ada alokasi anggaran APBD yang khusus menangani air limbah permukiman.
10. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air;
11. Adanya perilaku buruk masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan daerah tangkapan air di hulu maupun di badan sungai;
12. Banyaknya daerah rawan kekeringan sehingga masyarakat sulit mendapatkan air bersih baik untuk kebutuhan sehari-hari atau pengairan pertanian pada setiap musim kemarau datang;
13. Terbatasnya biaya pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pengairan;
14. Adanya alih fungsi sawah beririgasi yang tidak sesuai Rencana Tehnis Ruang Wilayah;
15. Kurangnya kapasitas daya tampung penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat;

16. Minimnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pemafaatan sumber daya air seperti perizinan pemakaian tanah pengairan dan pemakaian air permukaan;
17. Perlunya peningkatan upaya mitigasi bencana alam geologi, dengan sosialisasi, pemantauan maupun pemasangan alat pantau bencana alam geologi;

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah dimaksudkan untuk membandingkan antara hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan dengan pagu indikatif yang ada untuk setiap Perangkat Daerah. Adapun review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen sebagai berikut:

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

2.5.1. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Telaahan visi misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor – faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah.

a. Visi

Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang. Visi Bupati Kebumen Tahun 2016-2021 yaitu;

“BERSAMA MENUJU MASYARAKAT KEBUMEN YANG SEJAHTERA, UNGGUL, BERDAYA, AGAMIS DAN BERKELANJUTAN”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. Bersama : bermakna bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan, seluruh komponen masyarakat dan pemerintah bergerak bersama-sama dan saling menguatkan sebagai sebuah kesatuan yang kokoh dan sinergis;
2. Menuju : bermakna bahwa dalam melaksanakan pembangunan senantiasa memiliki arah dan tujuan yang jelas dan terukur;
3. Sejahtera : bermakna bahwa pembangunan harus diorientasikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berupa pangan, sandang, papan (perumahan), kesehatan, pendidikan dan sosial sehingga tercipta kemanusiaan yang adil dan beradab;
4. Unggul : bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang kuat, tangguh dan utama serta

- mampu menghadapi dan menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi;
5. Berdaya : bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang memiliki kekuatan, kemampuan dan tenaga serta memiliki solusi terbaik dalam menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi;
6. Agamis : bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang sempurna bukan hanya pada aspek/dimensi jasad/fisiknya saja, melainkan juga dari segi pengembangan potensi intelektual, rohaniah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya, yang dicirikan dengan sifat-sifat keimanan, ketakwaan, keadaban, keilmuan, kemahiran, ketertiban, kegigihan dalam kebaikan dan kebenaran, persaudaraan, persepakatan dalam hidup dan perpaduan dalam umat;
7. Berkelanjutan : bermakna bahwa seluruh pembangunan harus dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi dengan baik serta memiliki keberlangsungan terus-menerus (berkesinambungan) sehingga tercipta pembangunan yang bermanfaat dan berdaya guna bagi masyarakat.

b. Misi

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut :

1. Membangun sumberdaya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas;
2. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan

secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat;

3. Mengembangkan kemandirian perekonomian daerah yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal unggulan melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, industri, pariwisata dan sektor lainnya, dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta berwawasan lingkungan;
4. Meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan;
5. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, meningkatkan nilai kualitas pendidikan serta membuka akses kesehatan yang maksimal dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat; dan
6. Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen menjabarkan dalam beberapa misi. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi OPD. Dalam dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi OPD. Misi ini dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi (kekuatan, kelemahan, peluang, dan

tantangan) pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi OPD.

Dalam perumusan misi ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memperhatikan misi Bupati Kebumen yang terdapat dalam RPJMD. Misi ini sejalan dengan Misi III Bupati Kebumen dan sesuai fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen yaitu:

Misi III : Mengembangkan kemandirian perekonomian daerah yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal unggulan melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, industri, pariwisata dan sektor lainnya, dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta berwawasan lingkungan.

Misi VI : Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama.

Memperhatikan Visi dan Misi Bupati Kebumen tersebut maka peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen adalah bagaimana melaksanakan pembangunan daerah yang senantiasa dilandasi keinginan untuk terus maju dan mandiri, terutama di sektor pekerjaan umum.

Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ini selaras dengan visi :

1. RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2005 – 2025 : Kabupaten Kebumen yang Sejahtera, Maju dan Madani.
2. RPJP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 : Jawa Tengah yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Lestari.
3. RPJM Nasional Tahun 2015 – 2020 : Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera.

4. RPJP Nasional Tahun 2005 – 2025 : Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur.

Beberapa permasalahan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen diidentifikasi untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambatnya.

2.5.2. Telahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Renstra Provinsi Jawa Tengah dengan Kabupaten

a. Visi :

Rencana Strategis Kementrian Pekerjaan Umum 2015 – 2019 adalah sebagai berikut : **“TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT YANG HANDAL DALAM MENDUKUNG INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”**.

Visi tersebut merupakan sebuah gambaran yang akan diwujudkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum periode 2015-2019, dimana infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang terbangun telah memenuhi kualifikasi teknis sesuai perkembangan dan kemajuan teknologi serta beroperasi secara optimal seiring dengan tuntutan kualitas kehidupan masyarakat.

Infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang **handal** diartikan sebagai tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang *produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar*, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera.

Infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal secara lebih rinci diperlukan untuk mendukung agenda prioritas nasional antara lain untuk meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; serta

untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara

Makna dari infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang andal merupakan perwujudan dari tingkat ketersediaan dan pelayanan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang penjabarannya meliputi:

Kondisi dan fungsi sarana dan prasarana sumber daya air yang dapat

1. memberikan pelayanan yang mendukung terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan;
2. Pelayanan jalan yang memenuhi standar pelayanan minimum yang mencakup aspek aksesibilitas (kemudahan pencapaian), mobilitas, kondisi jalan, keselamatan dan kecepatan tempuh rata-rata;
3. Pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas yaitu penyediaan air minum yang memenuhi standar baku mutu dan kesehatan manusia dan dalam jumlah yang memadai serta jaminan pengaliran 24 (dua puluh empat) jam per hari;
4. Pelayanan prasarana dan sarana sanitasi yang terpadu dan menggunakan metode yang ramah lingkungan serta sesuai standar teknis;
5. Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan;
6. Penyusunan program dan pelaksanaan pembangunan semua infrastruktur PU dan permukiman yang andal tersebut berbasis penataan ruang; dan
7. Jasa konstruksi nasional yang berdaya saing dan mampu menyelenggarakan pekerjaan konstruksi yang lebih efektif dan efisien.

Kondisi dan kualitas pelayanan tersebut dibarengi dengan cakupan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang semakin luas, merata dan berkeadilan, sehingga tercipta kehidupan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan yang mencerminkan keadaan masyarakat yang semakin sejahtera.

b. **Misi**

Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan rumusan upaya yang akan dilaksanakan selama periode Renstra 2015–2019 dalam rangka mencapai visi serta mendukung upaya pencapaian target pembangunan nasional, berdasarkan mandat yang

diemban oleh Kementerian PU dan Perumahan Rakyat sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, amanat RPJMN tahap ketiga serta perubahan kondisi lingkungan strategis yang dinamis adalah sebagai berikut:

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energy, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip ‘infrastruktur untuk semua’;
4. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI;
5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, mengorganisasikan yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.

c. **Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**

Sebagai penjabaran atas visi Kementerian PUPR, maka tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan rumusan kondisi yang hendak dituju di akhir periode perencanaan. Tujuan ini merupakan penjabaran dari visi serta dilengkapi dengan rencana sasaran strategis yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran nasional yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019. Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara umum

adalah menyelenggarakan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan yang *produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar*, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera. Lebih lanjut, tujuan tersebut di jabarkan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan;
2. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
3. Menyelenggaraaan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
4. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua
5. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel

d. **Sasaran Strategis Kementerian Pekerjaan Umum**

Goals Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (*dampak/Impact* pada level *stakeholders*) yang dalam hal ini merupakan kondisi yang mencerminkan dampak dari pengaruh hasil sasaran-sasaran strategis (*outcome/impact* pada level *customer yang dilayani*)

yaitu meningkatnya kehandalan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mewujudkan: kedaulatan pangan, ketahanan air, dan kedaulatan energi; konektivitas bagi penguatan daya saing; layanan infrastruktur dasar; dan keseimbangan pembangunan antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan sehingga dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat.

Sementara sasaran strategis (*outcome/impact* pada level *customers*) dalam hal ini merupakan kondisi yang hendak dicapai secara nyata oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai penjabaran dari tujuan yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) satu atau beberapa program. Sasaran-sasaran strategis tersebut digambarkan dalam sebuah peta strategi sebagai petunjuk jalan untuk mencapai visi.

Sasaran strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam periode 2015-2019 secara keseluruhan akan meliputi sasaran-sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya keterpaduan pembangunan insfrastruktur PUPR antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan.
2. Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan ketahanan energi.
3. Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing.
4. Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan.
5. Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran.
6. Meningkatnya ketahanan air.
7. Meningkatnya kemantapan jalan nasional.
8. Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan.
9. Meningkatnya cakupan pelayanan dan akses permukiman yang layak.
10. Meningkatnya kapasitas dalam pengendalian kualitas konstruksi nasional.
11. Meningkatnya pengendalian dan pengawasan.
12. Meningkatnya SDM yang kompeten dan berintegritas.
13. Meningkatnya budaya Kementerian PUPR yang berkinerja tinggi dan berintegritas.
14. Meningkatnya inovasi terapan bidang PUPR.
15. Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, sarana prasarana dan teknologi informasi.

2.5.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

1. Tantangan pembangunan bidang penataan ruang

- a. Melengkapi peraturan perundang-undangan dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang penataan ruang untuk mendukung implementasi penataan ruang di lapangan.
- b. Meningkatkan pemanfaatan RTR secara optimal dalam mitigasi dan penanggulangan bencana, peningkatan daya dukung wilayah, dan pengembangan kawasan.
- c. Meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang terutama melalui dukungan sistem informasi dan monitoring penataan ruang di daerah untuk mengurangi terjadinya konflik pemanfaatan ruang antarsektor, antarwilayah, dan antarpelaku.
- d. Meningkatkan kepastian hukum dan koordinasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- e. Meningkatkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat (termasuk perempuan) dalam penyelenggaraan penataan ruang.

2. Isu strategis bidang penataan ruang

- a. Optimalisasi dan peningkatan kualitas sarana prasarana transportasi dan komunikasi penunjang pembangunan daerah.
- b. Peningkatan sarana prasarana dan pengelolaan jaringan irigasi dan sumberdaya air untuk mendukung pembangunan bidang pertanian dan menjaga ketersediaan air bagi kehidupan masyarakat prasarana dan pengelolaan jaringan irigasi dan sumberdaya air.
- c. Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana cipta karya.
- d. Peningkatan pelayanan air minum, pengelolaan sanitasi, dan pengelolaan SDA.
- e. Ketersediaan rumah layak huni (RLH) bagi masyarakat yang semakin meningkat, baik secara kuantitas maupun kualitas
- f. Peningkatkan kualitas prasarana dan fasilitas LLAJ untuk mendukung terciptanya ketertiban pengguna kendaraan bermotor dalam mengurangi risiko kecelakaan.
- g. Peningkatan pelayanan bidang ketenagalistrikan
- h. Meningkatkan kemampuan aparat perencana maupun pelaksana pengendali dan pengawas pemanfaatan ruang, baik di tingkat

pusat maupun di daerah, untuk menjamin pelaksanaan RTR yang semakin berkualitas serta dalam rangka pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang yang efektif.

- i. Menyelenggarakan upaya-upaya sosialisasi yang lebih memadai guna meningkatkan dukungan masyarakat terhadap kegiatan penataan ruang, baik dalam perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang.
- j. Menyelaraskan pola penyusunan RTRW di daerah dalam rangka menjaga keserasian antardaerah dan antartingkatan RTRW.
- k. Meningkatkan alih fungsi lahan pertanian dan nonpertanian.
- l. Terbangunnya Ruang Terbuka Hijau guna mendukung pencapaian 20% dari wilayah perkotaan.

3. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa penataan ruang wilayah Nasional, wilayah Propinsi, wilayah Kabupaten/ Kota dilakukan secara terpadu dan tidak dipisah-pisahkan. Penataan ruang dimaksud, disamping meliputi ruang daratan, juga mencakup ruang lautan dan ruang udara sampai batas tertentu yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Ruang Kabupaten Kebumen merupakan satu kesatuan ruang dengan cakupan luasan sebesar 128.111,50 Ha yang terdiri atas 26 Kecamatan yang terdiri atas komponen yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Ruang wilayah Kabupaten Kebumen dalam rangka pelaksanaan pembangunan perlu dikelola, dimanfaatkan dan dilindungi untuk sebesar - besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Ruang dalam arti wadah bagi kehidupan manusia yang meliputi tanah, air, dan ruang angkasa beserta sumber alam yang terkandung di dalamnya sebagai satu kesatuan, ketersediaanya bukan tak terbatas, baik dalam pengertian mutlak maupun dalam pengertian nisbi, sehingga kegiatan budidaya untuk pemanfaatannya yang tak terkendali akan menyebabkan rusaknya lingkungan ruang itu sendiri yang pada akhirnya dapat berakibat malapetaka bagi penghuninya.

Selama ini, proses pembangunan yang terformulasikan dalam kebijakan, rencana dan program dipandang kurang

mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan secara optimal. Upaya-upaya pengelolaan lingkungan pada tataran kegiatan atau proyek melalui berbagai instrument seperti antara lain AMDAL, dipandang belum menyelesaikan berbagai persoalan lingkungan hidup, mengingat berbagai persoalan lingkungan hidup berada pada tataran kebijakan dan program.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan upaya untuk mencari terobosan dan memastikan bahwa pada tahap awal penyusunan kebijakan, rencana dan/ atau program prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sudah dipertimbangkan. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bermanfaat untuk menjamin bahwa setiap kebijakan, rencana dan/atau program “lebih hijau” dalam artian dapat menghindarkan atau mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dalam hal ini, KLHS berarti juga menerapkan prinsip *precautionary principles*, dimana kebijakan, rencana dan/atau program menjadi garda depan dalam menyaring kegiatan pembangunan yang berpotensi mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Dalam kerangka itulah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen, khususnya Seksi Perumahan dan Tata Ruang Bidang Cipta Karya, berusaha melahirkan produk-produk perencanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan demi mengurangi dampak negative terhadap lingkungan perencanaan di Kabupaten Kebumen.

BAB III.
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Program/kegiatan diperoleh berdasarkan dari usulan masyarakat melalui musrenbangdes, musrenbangcam, forum SKPD serta Murenbangkab meliputi:

- a) Meningkatkan kualitas dan kapasitas prasarana dan sarana jaringan irigasi serta pengembangan tampungan air baku secara berkelanjutan;
- b) Meningkatkan kerjasama dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipasi, penyediaan air bersih dan sanitasi serta air baku berbasis pemberdayaan;
- c) Meningkatkan struktur, pelebaran dan pemeliharaan berkala serta menjaga kondisi baik jalan dan jembatan dengan mengupayakan peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan jalan;
- d) Meningkatkan penanganan pada ruas jalan dan jembatan utamanya untuk mendukung pembangunan sosial, ekonomi dan pengembangan wilayah;
- e) Meningkatkan ketersediaan peralatan penanganan jalan dan SDM teknis kebinamargaan serta pengembangan sistem informasi manajemen dan publik;
- f) Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan fasilitasi dalam pengembangan, penyediaan dan penanganan infrastruktur strategis (jalan strategis pendukung perekonomian, waduk /embung) dan;
- g) Meningkatkan upaya dukungan pembiayaan dan penanganan dari pemerintah dan kerjasama pemerintah dan swasta.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi yang ditetapkan.

No	Misi	Tujuan	Sasaran
1.	Meningkatkan kualitas sumber Daya Manusia (SDM) dibidang pekerjaan umum.	Tercukupinya tenaga teknis yang memadai dibidang pekerjaan umum dalam perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan pengawasan	➤ Masyarakat Jasa Konstruksi ➤ Tenaga/Kader pembangunan perdesaan
2	Meningkatkan kualitas Perencanaan Teknis bidang pekerjaan umum	Tersedianya / tersusunnya dokumen perencanaan di bidang pekerjaan umum yang berkualitas dan sinkron dengan perencanaan	➤ Meningkatnya Dokumen perencanaan teknis di bidang pekerjaan Umum

		pembangunan daerah	
3.	Meningkatkan sarana dan prasarana dasar permukiman dan penataan ruang	Pelayanan masyarakat dibidang permukiman dan penataan ruang	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tertatanya lingkungan permukiman ➤ Tersedianya sarana gedung pemerintah ➤ Melancarkan aliran drainase dilingkungan permukiman ➤ Meningkatkan ketersediaan air bersih diwilayah perkotaan dan perdesaan ➤ Meningkatkan sarana sanitasi dan penyehatan lingkungan
4.	Meningkatkan aksesibilitas untuk mengurangi keterisolasian dan mendorong pembangunan kawasan perdesaan dan kawasan potensial.	Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan dan jembatan.	➤ Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan dan jembatan.kabupaten dan jalan dan jembatan poros desa.
5.	Meningkatkan pelayanan kebersihan, keindahan kota, pemakaman umum dan lampu penerangan jalan umum.	Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatnya kebersihan dan keindahan diwilayah perkotaan. ➤ Meningkatnya penerangan di tempat umum dan strategis. ➤ Tersedianya kawasan pemakaman
6.	Meningkatkatnya Pengendalian, pengawasan, dan pembinaan terhadap kegiatan bidang pekerjaan umum	Terlaksananya kegiatan fisik konstruksi yang sesuai dengan aspek teknis.	➤ Tercapainya pekerjaan tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran.

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu “PELAYANAN BIDANG PEKERJAAN UMUM YANG PROPORSIONAL, BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN”. Secara garis besar program yang akan dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2017 mencakup 23 rogram 66 Kegiatan, dengan Rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1. Program Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Program Pelayanan Adiministrasi Perkantoran	1. Penyediaan Jasa Surat menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional 4. Penyediaan Jasa Administrasi

NO	PROGRAM	KEGIATAN
		Keuangan 5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 7. Penyediaan Alat Tulis Kantor 8. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan 9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 10. Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan 11. Penyediaan Makanan dan Minuman 12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 13. Penunjang Administrasi Perkantoran 14. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	15. Pembangunan Gedung Kantor 16. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 17. Pengadaan Tanah 18. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor 19. Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeleur
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	20. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	21. Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD
5.	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	22. Peningkatan Jalan (BANPROV) 23. Peningkatan Jalan 24. Peningkatan jembatan
6.	Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan	25. Perencanaan Pembangunan Jalan 26. Perencanaan pembangunan jembatan 27. Pembangunan jembatan 28. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
7.	Program Pengembangan data/Informasi	29. Penyusunan dan pengumpulan data informasi/Kebutuhan

NO	PROGRAM	KEGIATAN
		Dokumen perencanaan.
8.	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	30. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
9.	Program Pembinaan Dan Penembangan bidang ketenagalistrikan	31. Lampu Penerangan Jalan Umum Kabupaten Kebumen. 32. Pengembangan/perluasan Jaringan Listrik perdesaan (Banprov)
10.	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	33. Peningkatan manajemen aset/barang daerah.
11.	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	34. Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha
12.	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	35. Perencanaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan 36. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 37. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan 38. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK) 39. Pengadaan Semen untuk Pembangunan Sarana Prasarana Pedesaan/Perkotaan
13.	Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong.	40. Rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong.
14.	Program perencanaan pembangunan ekonomi	41. koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
15.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	42. Pengadaan Alat-alat berat 43. Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat
16.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	44. Perencanaan pembangunan jaringan irigasi 45. Perencanaan normalisasi saluran sungai 46. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 47. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi 48. Operasi dan pemeliharaan Sungai 49. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK)

NO	PROGRAM	KEGIATAN
17.	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	50. Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya
18.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	51. Penyediaan prasarana dan sarana air limbah 52. Pengembangan sistem distribusi air minum
19.	Program Pengendalian Banjir	53. Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai 54. Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai 55. Normalisasi/Pembangunan Jaringan Drainase 56. Operasi dan Pemeliharaan Pantai dan Muara 57. Rehabilitasi / Pembangunan Pantai dan Muara 58. Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai (BANPROP)
20.	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	59. Perencanaan pengembangan infrastruktur
21.	Program pembangunan infrastruktur Perdesaan	60. Pembangunan Sarana dan prasarana air bersih perdesaan 61. Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan 62. Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan (Kuota Kecamatan) 63. Pembangunan Sarana dan prasarana air bersih perdesaan (Kuota Kecamatan) 64. Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan (Kuota Kecamatan)
22.	Program Perencanaan Tata Ruang	65. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
23.	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	66. Pengawasan pemanfaatan ruang

BAB IV. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2018, yang menguraikan secara ringkas program dan kegiatan dalam upaya menterjemahkan visi dan misi yang diemban, untuk mendapat tanggapan dari segenap pihak yang berkepentingan di Kabupaten Kebumen semoga dengan tersusunnya dokumen rencana kerja ini dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan dapat memberi manfaat bagi semua pihak yang terkait.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KEBUMEN

H. SLAMET MUSTOLKHAH, ST. MT
NIP.19690922 199703 1 005